Jurnal Pemerintahan dan Politik
Vol. 11 No. 2 Mei 2026, pp. 620-635
DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v11i2.6456
■ Received : 10/12/2025 ■ Revised : 25/04/2026 ■ Accepted : 01/05/2026

Multi-actor Synergy and Collaborative Governance in the SDGs-Based Management of MECoK Ecopark in Jepara

Miladiya Cahyati, M. Nur Rofiq Addiansyah
Universitas Islam Negeri Sunan Kudus
Kudus, Indonesia

Email correspondence : miladiya012@gmail.com

Abstract

Purpose : This study aims to analyze the synergy between multi-actor actors in the management of MECoK Ecopark in Jepara using the Ansell and Gash Collaborative Governance model perspective as a theoretical framework.

Design/Methodology/Approach : The research adopted a qualitative approach using a case study. The study included primary data collected through interviews, documentation, and field observations. Secondary data was obtained through documentation studies on the organization's official website and literature review of e-books and e-journals.

Findings : MECoK's management synergy aligns with Ansell and Gash's model of Starting Conditions, Facilitative Leadership, and Collaborative Process. However, there is a gap in Institutional Design, where collaboration is still conducted informally without a long-term management MoU. Nevertheless, MECoK has proven to contribute to the Sustainable Development Goals (SDGs).

Practical Implications : Research suggests the need for accountability mechanisms, role redistribution, and more structured cooperation agreements to shift collaboration from dependence on specific actors to institutional sustainability.

Originality/Value : Different from previous research that focused on socio-ecological aspects, this paper provides novelty by examining the synergy of MECoK management using a collaborative governance framework, while also contributing theoretically by demonstrating that cohesion between actors can substitute institutional formalization as a determinant of collaboration effectiveness.

Keywords : Multi-actor, Collaborative Governance, SDGs, Ecopark.

Paper Type : Case Study.

Disclosure statement: The authors do not have any conflict of interest

Sinergi Multiaktor dan *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan MECoK Ecopark Berbasis SDGs di Jepara

Abstrak

Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergi antar pelaku multiaktor dalam pengelolaan MECoK Ecopark di Jepara, dengan perspektif *collaborative governance* model Ansell dan Gash sebagai kerangka teoritis.

Desain/metodologi/pendekatan : Penelitian mengadopsi pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Kajian mencakup data primer melalui wawancara, dokumentasi dan observasi lapangan. Adapun data sekunder didapat dari studi dokumentasi melalui *website* resmi organisasi dan studi pustaka dari *e-book,* dan *e-journal*.

Temuan : Sinergi pengelolaan MECoK menunjukkan keselarasan dengan model Ansell dan Gash pada *Starting Conditions*, *Facilitative Leadership*, dan *Collaborative Process*, namun terdapat gap *Institutional Design,* yang mana kolaborasi masih dijalankan dalam bentuk informal tanpa MoU pengelolaan jangka panjang. Meski demikian, MECoK terbukti berkontribusi terhadap target pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Implikasi Praktis : Penelitian menyiratkan perlunya mekanisme akuntabilitas, redistribusi peran, serta kesepakatan kerjasama yang lebih terstruktur guna menggeser kolaborasi dari ketergantungan pada aktor tertentu menuju keberlanjutan kelembagaan.

Originalitas/Nilai : Berbeda dari riset sebelumnya yang fokus terhadap aspek sosial-ekologis, tulisan memberi kebaruan dengan mengkaji sinergi pengelolaan MECoK menggunakan kerangka *collaborative governance,* sekaligus menyumbang kontribusi teoritis dengan mendemonstrasikan bahwa kohesi antaraktor dapat mensubtitusi formalisasi kelembagaan sebagai determinan efektivitas kolaborasi.

Kata Kunci : Multiaktor, *Collaborative Governance*, SDGs, *Ecopark*.

Jenis Penelitian : *Case Study* (Studi Kasus).

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi agenda global sejak diadopsinya *Sustainable Development Goals* (SDGs), pada Bulan September 2015 dalam sidang umum PBB. SDGs berisi 17 tujuan dengan 169 target untuk periode implementasi 2015-2030, guna mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, hingga lingkungan (Siringoringo, 2022). Meskipun bersifat global, asas pencapaian SDGs tetap bergantung pada upaya implementasi di tingkat lokal "*localizing SDGs*". Hal tersebut karena berbagai isu pembangunan acapkali termanifestasi nyata dari tingkat lokal dan regional (Darniyus, 2025). Lebih dari itu, pencapaian SDGs juga membutuhkan pendekatan kolaboratif yang tidak mampu dituntaskan oleh sektoral saja, akan tetapi perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam formulasi kebijakannya (Pradana et al., 2025).

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia mempunyai potensi strategis pada ekosistem pesisir yang mendukung capaian pembangunan berkelanjutan. Kawasan mangrove sebagai salah satu ekosistem yang memainkan peran penting, terutama dalam pertahanan garis pantai, serapan karbon, mitigasi perubahan iklim, bahkan mendukung keberlanjutan sosial-ekonomi masyarakat pesisir. Sebagaimana (Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2025 Tentang Perlindungan & Pengelolaan Ekosistem Mangrove, 2025) secara eksplisit mengakui mangrove sebagai unit vegetasi penting bagi stabilitas pesisir. Namun, regulasi tersebut belum tentu menjamin tata kelola yang memadai di lapangan. Studi empiris menunjukkan banyak pengelolaan mangrove yang cenderung sektoral dan kurang memiliki sinergi terstruktur antar pemangku kepentingan (Enala et al., 2025). Sehingga, kontradiksi antara regulasi dan implementasi dapat membatasi peran optimal mangrove dalam mendukung SDGs. Presta et al. (2025) menekankan dalam temuannya bahwa kegagalan konservasi mangrove bukan disebabkan oleh absennya regulasi, namun karena fragmentasi kelembagaan dan koordinasi manajemen yang lemah. Hal ini menunjukkan bahwa masalah mendasar pengelolaan mangrove di Indonesia terletak pada lemahnya tata kelola dan bukan sekadar ketiadaan regulasi, namun lebih pada sejauh mana kolaborasi dapat melampaui formalitas kelembagaan mencapai sinergi yang substantif.

Fenomena berbeda justru ditemukan pada kawasan MECoK (Mangrove Education Center of KeSEMaT) yang belum banyak dikaji dalam studi tata kelola konservasi. MECoK merupakan arboretum mangrove yang dikembangkan sejak tahun 2001. Kawasan ini terletak di pesisir Desa Teluk Awur, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah dan dikelola dalam lingkup *Marine Science Techno Park* (MSTP) oleh Universitas Diponegoro (UNDIP). MECoK telah mendapat pengakuan formal ditandai dengan penghargaan Kalpataru yang diperolehnya pada Tahun 2019, dan tercatat sebagai praktik konservasi unggul dalam laporan resmi Presiden Indonesia kepada PBB. MECoK dikelola oleh komunitas yang lahir dari lingkungan akademik dengan dukungan institusional kampus sebagai fasilitator dan mitra kolaborasi. Karakteristik tersebut membuat MECoK tampak distingtif, sebab inisiatif pengelolaan berbasis akademik pada konfigurasi multiaktor yang tidak lazim dijumpai dalam kajian tata kelola konservasi. Tidak hanya itu, sepanjang perkembangannya MECoK juga sukses menunjang berbagai target tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Namun di balik capaian tersebut, belum ada studi sistematis mengenai dinamika sinergi aktor yang berperan di dalamnya, disparitas empiris inilah yang menjadi dasar dan urgensi tulisan ini.

Beragam literatur terdahulu telah mengkaji persoalan mangrove seiring tingginya tekanan degradasi pesisir Indonesia. Rohmawati et al. (2022) mengungkap konservasi mangrove di Pantai Glagah Wangi, Demak, memberi efek berlapis dari segi ekologi hingga ekonomi dan selaras dengan agenda SDGs. Temuan Fuady et al. (2025) menyatakan capaian konservasi berbasis SDGs mensyaratkan partisipasi aktif seluruh aktor kolaboratif. Penelitian lainnya tentang degradasi mangrove di Gorontalo turut berakar dari regulasi yang lemah, sehingga pendekatan kolaboratif menjadi penentu keberlanjutan ekosistem (Widodo et al., 2025). Riset Serhalawan et al. (2025) menemukan tutupan kanopi berada pada kategori sedang akibat tekanan aktivitas wisata yang tidak terkelola. Deciawarman et al. (2025) juga menegaskan model *Community-Based Mangrove Management* terbukti efektif dibanding intervensi sepihak sebab memungkinkan integrasi pengetahuan lokal dan insentif ekonomi jangka panjang. Aspek ini secara spesifik dikaji melalui skema *collaborative governance* oleh (Pinandhika & Harsono, 2023) yang menemukan belum optimalnya kolaborasi disebabkan lemahnya *shared understanding* dan forum komunikasi, serta tidak adanya MoU yang mengikat komitmen secara formal.

Selain temuan di atas, literatur lainnya juga memberikan dasar komparatif guna memahami dinamika pengelolaan mangrove di kawasan pesisir, termasuk pada MECoK Jepara sendiri yang telah dikaji dari berbagai perspektif. Riset Azzahra et al. (2025) meneliti struktur vegetasi dan menemukan kondisi ekologis kawasan cukup mendukung apabila dikelola lebih lanjut. Kemudian temuan lain mengonfirmasi potensi ekowisata MECoK cukup memadai meski membutuhkan penguatan infrastruktur (Ibramsyah & Samadi, 2024). Pamungkas et al. (2024) juga mendapati bahwa di MECoK, *Resources Actor* mendominasi konektivitas antaraktor, ini mengindikasi besarnya peran pengelola untuk kelangsungan ekosistem. Kurniati et al. (2024) juga menambah bahwa dalam pengembangan eduekowisata MECoK, peranan masyarakat masih rendah sebab minimnya koordinasi antarpihak. Namun demikian, meskipun telah ada berbagai aspek penelitian di MECoK, bukti mengenai bagaimana interaksi antaraktor dalam praktik pengelolaan masih sangat terbatas, padahal efektivitas kolaborasi juga merupakan faktor penentu kesuksesan konservasi tersebut.

Tulisan ini hadir untuk mengisi celah empiris dengan menganalisis bagaimana sinergi antaraktor dibangun, diimplementasikan dan berdampak pada pembangunan berkelanjutan, dengan meninjau: *1) Struktur dan peran aktor dalam pengelolaan MECoK Ecopark, 2) Keselarasan praktik kolaborasi dengan model Collaborative Governance Ansell & Gash (2008), serta 3) Kontribusinya terhadap pencapaian target SDGs.* Penulis berargumen bahwa suksesnya MECoK tidak terlepas dari kualitas sinergi aktor pengelolanya, justru mekanisme yang ada akan berdampak pada pengembangan bentuk tata kelola konservasi yang berkelanjutan. Tujuan tulisan ini adalah untuk menganalisis sinergi antaraktor dalam pengelolaan MECoK serta implikasinya terhadap efektivitas tata kelola kawasan. Fenomena ini diteliti menggunakan kerangka *collaborative governance* Ansell dan Gash sebagai alat analisis. Sebagaimana Ansell dan Gash (2008), mendefinisikan *collaborative governance* sebagai sistem tata kelola yang melibatkan lembaga publik maupun non-publik dalam pengambilan keputusan kolektif.

Kerangka *collaborative governance* dianggap relevan sebab bukan hanya menegaskan eksistensi kolaborasi sebagai asas kebijakan, namun secara analitis mengurai keadaan yang menentukan efektivitas atau kegagalannya. Dalam riset

ini teori tersebut bukan sekadar diasumsikan secara normatif, melainkan untuk menguji konsistensi kolaborasi dan merefleksikan prinsip tata kelola berbasis komunitas akademik yang berbeda dari asumsi model aslinya, melalui empat komponen Ansell dan Gash (2008) dalam *collaborative governance*, yakni: *starting conditions*, *institutional design*, *facilitative leadership*, dan *collaborative process*. Studi ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan desain kolaborasi yang lebih inklusif, sekaligus memacu penguatan desain kelembagaan MECoK supaya dapat lebih konkret menuju sinergi kolaborasi yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Riset menggunakan metode kualitatif untuk menelaah sinergi multiaktor dalam pengelolaan MECoK Ecopark di Jepara. Metode kualitatif dipilih karena lebih menguatkan eksplorasi terhadap dinamika kolaborasi yang sulit diukur secara kuantitatif. Sebagaimana Cresswell (2009) mengungkap metode kualitatif sebagai upaya membangun deskripsi yang kompleks dari himpunan data non-numerik yang diuraikan dengan interpretasi makna. Penelitian mengadopsi pendekatan studi kasus merujuk pada Yin (2018), untuk menangkap fenomena kontemporer tanpa intervensi terhadap suatu peristiwa dengan fokus pada sinergi pengelolaan MECoK Ecopark. Riset menerapkan teori *Collaborative Governance* mencakup 4 dimensi Ansell dan Gash (2008), yakni: *Starting Conditions, Facilitative Leadership, Institutional Design,* dan *Collaborative Process.* Bahan kajian mencakup data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara melalui *Microsoft Teams*, observasi dan dokumentasi lapangan pada Bulan Oktober 2025. Data sekunder didapat dari studi dokumentasi melalui situs resmi *(ikamat.org., kesemat.or.id.)* dan studi pustaka *e-book, e-journal*.

Wawancara mendalam dilakukan dengan penentuan informan secara *Purposive Sampling.* Cakupan informan dalam penelitian ini difokuskan pada 2 (dua) aktor internal, melibatkan *key informants* dari Founder KeSEMaT dan Direktur Program IKAMaT. Kriteria informan diambil berdasarkan *experiential knowledge* yang mendalam terhadap dinamika pengelolaan sejak inisiasi konservasi. Riset menyadari cakupan narasumber berimplikasi pada minimnya sudut pandang eksternal, terutama dari pemerintah dan masyarakat. Namun, batasan tersebut merupakan konsekuensi metodologis dari sasaran kajian pada dinamika pengelola inti. Untuk itu, kredibilitas temuan dipertahankan melalui teknik triangulasi sebagai upaya meminimalkan bias interpretasi. Analisis data dilakukan dengan transkripsi, reduksi data, pengkodean berdasarkan komponen *collaborative governance* Ansell dan Gash (2008), kategorisasi temuan, dan interpretasi pola hubungan antar kategori. Terakhir, penarikan simpulan dilakukan melalui triangulasi sumber guna memastikan validitas temuan.

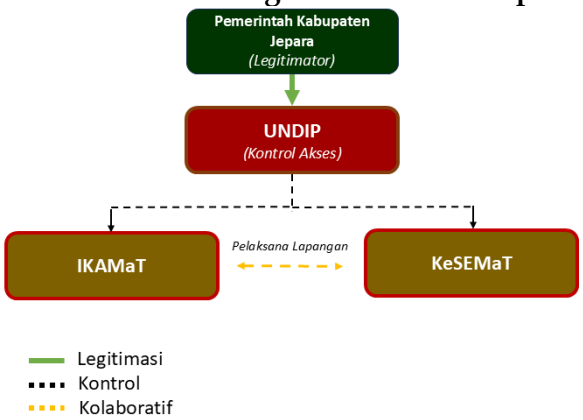
HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur dan Peran Aktor dalam Pengelolaan MECoK Ecopark

MECoK Ecopark bermula dari inisiatif Mahasiswa Program Studi Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro (UNDIP) Jepara yang tergabung dalam KeSEMaT (Kelompok Studi Ekosistem Mangrove Teluk Awur), yang merespons degradasi lingkungan dan abrasi di pesisir Teluk Awur. Kesadaran ekologis tersebut menjadi titik awal yang bertransformasi menjadi pola konservasi multistakeholder. Di mana KeSEMaT membentuk IKAMaT sebagai wadah keberlanjutan kiprah konservasi, serta UNDIP yang berperan sebagai pemilik

lahan sekaligus fasilitator kolaborasi yang menjamin pengelolaan berbasis keilmuan. Kemudian, Pemerintah Kabupaten Jepara juga memberikan legitimasi hukum dengan penetapan kawasan sebagai taman kota yang secara signifikan ini membuka akses MECoK sebagai ruang publik yang diakui secara administratif.

Gambar 1. Peta Aktor Pengelola MECoK Ecopark Jepara



Sumber : diolah oleh penulis, 2025

Sebagaimana ilustrasi pada Gambar 1, susunan aktor dalam manajemen MECoK memperlihatkan pola kolaborasi yang berlapis dengan diferensiasi kewenangan yang jelas. Kedudukan sentral UNDIP yang bertumpuan dengan pengontrol akses mencerminkan karakteristik *lead organization model*, model ini menempatkan satu aktor sebagai simpul koordinatif utama karena kendalinya atas sumber daya strategis (Jamily, 2024). Dilihat dari perspektif relasi kuasa posisi ini bukan hanya bersifat koordinatif namun juga struktural, sebab kendali atas akses kawasan menciptakan ketergantungan aktor lain dalam menjalankan perannya. Dalam implementasinya, situasi ini menempatkan UNDIP sebagai otoritas utama dalam proses perumusan arah serta persetujuan kebijakan strategis, sementara aktor lainnya sebagai motor penggerak pada ranah operasional dan teknis pelaksanaan.

Keterlibatan Pemerintah Kabupaten Jepara melalui penetapan area sebagai taman kota dan pemberian payung hukum menunjukkan bahwa jaringan ini tetap beroperasi dalam struktur regulasi formal. Di sisi lain, organisasi IKAMaT beserta KeSEMaT melakukan fungsi operasional dan teknis dalam ruang yang terinstitusionaisasi, sehingga otonomi mereka bersifat kontekstual dalam batasan yang ditentukan oleh struktur kepemilikan dan peraturan yang berlaku. Meski demikian, kesertaan pemerintah melalui legitimasi dan regulasinya merupakan proteksi, tidak dengan menghilangkan fleksibilitas operasional di lapangan.

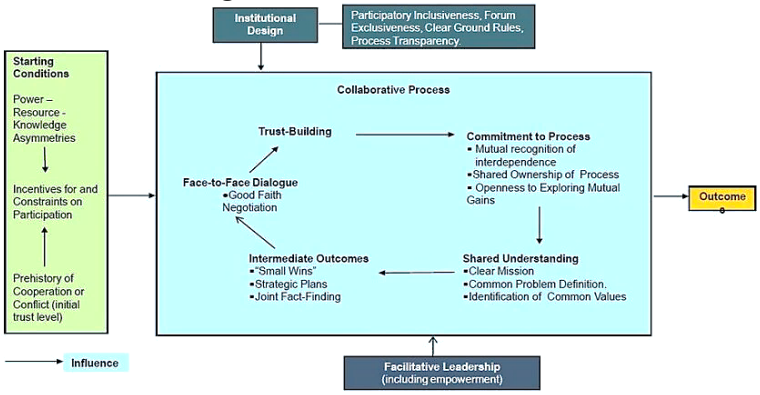
Analisis kajian ini memang terbatas pada aktor-aktor yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan kawasan. Meskipun konservasi mangrove telah berdampak terhadap ekologis maupun masyarakat lokal, posisi masyarakat cukup sebagai *passive beneficiaries* karena inisiatif pengembangan kawasan MECoK awalnya memang didorong oleh civitas akademika, bukan dari desa atau wilayah setempat, sehingga masyarakat tidak berperan dalam forum kolaborasi. Dengan demikian, MECoK dapat dipahami sebagai bentuk *collaborative governance* yang elitis, di mana kolaborasi terjadi dalam lembaga formal, sementara masyarakat luas tetap berada di luar struktur tata kelola. Dalam hal ini meski terdapat regulasi termasuk instrumen pengawasan, pendekatan tersebut kurang efektif dalam

menjamin keberlanjutan jangka panjang, ini karena apabila terjadi minimnya pengawasan, pelanggar atau individu dapat mengeksploitasi celah hukum. Emerson et al. (2012) menegaskan *collaborative governance* yang efektif membutuhkan inklusivitas dan daya adaptif dalam kesepakatan bersama. Maka dari itu, ke depan MECoK diharap dapat lebih partisipatif dengan memposisikan masyarakat sebagai mitra guna membangun kontrol sosial yang lebih kuat daripada sekadar bertumpu dengan hukum formal.

Analisis Mekanisme Koordinasi Multiaktor model Collaborative Governance Ansell dan Gash

Model *collaborative governance* yang digagas oleh Ansell dan Gash (2008) mengusulkan kerangka analitis untuk memahami dinamika kolaborasi antaraktor dalam mengelola sumber daya bersama. Pola ini menggambarkan proses kolaboratif sebagai sistem yang saling terhubung, di mana keberhasilan ditentukan oleh empat elemen yang saling terkoneksi (Hidayatullah et al., 2023). Proses dimulai dari *starting conditions* yang seringkali menggambarkan ketimpangan awal antaraktor, lalu arah kerja sama melalui *institutional design* yang merujuk pada aturan main dan struktur partisipasi aktor. Kemudian akan diperkuat lagi dengan *facilitative leadership*, disini peran fasilitator adalah menjaga alur komunikasi dan terjalinnya konsensus. Semua itu akan disatukan dalam *collaborative process* yang merupakan inti dari model, dimana akan berlangsung *face-to-face dialogue, trust-building, commitment to process, shared understanding,* dan *intermediate outcomes* hingga memperoleh sejumlah hasil yang menguatkan kolaborasi pada tahap berikutnya (Permatasari, 2023).

Gambar 2. Model Kontingensi *Collaborative Governance* Ansell dan Gash



Sumber : ResearchGate.net

Model *Collaborative Governance* pada gambar diatas akan menjadi landasan bagi kajian ini untuk menelaah bagaimana praktik kolaborasi di MECoK Ecopark Jepara, akankah sejalan atau justru mengalami gap dengan komponen ideal dari Ansell dan Gash. Berikut analisisnya:

1) *Starting Conditions*

Dikutip dari Ansell dan Gash (2008), dinamika awal dan riwayat interaksi aktor menjadi titik awal proses kolaborasi. Berangkat dari paradigma tersebut, *starting conditions* kolaborasi MECoK mempunyai karakteristik tersendiri dibanding dengan model kolaboratif umumnya yang diinisiasi secara *top-down.* Dimana mulanya perjalanan diawali oleh inisiatif mahasiswa UNDIP di Jepara

yang mengidentifikasikan terjadinya abrasi di Teluk Awur. Mengetahui hal itu kemudian mereka melakukan rehabilitasi mangrove tanpa dukungan legalitas, tanpa MoU, bahkan tanpa pengakuan institusi secara formal. Berdasarkan wawancara, informan dari Founder KeSEMaT menerangkan:

> "*Kisah MECoK sebenarnya dimulai dari kebetulan yang luar biasa. Pada tahun 2001, ketika saya dan teman-teman masih mahasiswa semester 3 melihat kondisi lahan di pesisir Teluk Awur itu benar-benar gundul. Area tersebut terkena abrasi, ada beberapa tambak yang terbengkalai, dan hanya ada sedikit mangrove di deretan paling depan itu pun sudah mulai terabrasi. Dari situ tanpa pengetahuan yang formal tentang mangrove, karena kami memang belum mempelajari mata kuliah tentang mangrove, kami mencoba menanam. Yang mengejutkan adalah tanaman-tanaman tersebut ternyata tumbuh dengan baik. Melihat potensi ini, kami berkolaborasi dengan dosen untuk menginisiasi penelitian tentang mangrove, yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya MECoK*."(Wawancara, 27 November 2025).

Di sisi lain, pernyataan terkait hadirnya legalitas saat Pemerintah Kabupaten Jepara mulai menetapkan MECoK yang telah berkembang sebagai taman kota, menandai momentum yang mencerminkan perhatian dari pemerintah daerah. Dalam lingkup penelitian ini, kondisi awal di MECoK sudah ditandai dengan asimetri para aktor, dimana terlihat bahwa mahasiswa yang tergabung dalam KeSEMaT telah memiliki keunggulan fleksibilitas, akan tetapi masih minim dengan kekuatan dana dan legalitas. Kemudian posisi UNDIP yang mempunyai legitimasi namun baru berperan penuh ketika telah muncul hasil yang nyata, sementara Pemerintah Daerah yang baru hadir sesudah kawasan berkembang pesat.

Ansell dan Gash (2008) menegaskan *incentive to participate* sebagai rasa sukarela atau kesanggupan tiap pihak untuk bergabung dalam proses kolaborasi yang didasarkan pada kemampuan sumber daya dengan harapan bahwa proses kolaborasi akan menghasilkan sesuatu yang signifikan. Dalam hal ini meskipun keterlibatan antaraktor di MECoK berbeda, kolaborasi tetap akan berlangsung selagi semua pihak tetap mempunyai visi bersama yang kuat, termasuk dalam menaikkan fungsi ekologi dan penyelamatan pesisir dari abrasi. Justru asimetri awal akan menghasilkan struktur peran yang komplementer dan saling menunjang, sebab kontribusi masing aktor dapat berjalan sesuai dengan kapasitasnya. Dengan berbagi pengetahuan dan teknologi, akan memperkuat kapasitas untuk memecah persoalan yang mendorong pembangunan berkelanjutan. Kemitraan yang berdasar pada keuntungan dan kepentingan bersama akan menciptakan peluang untuk mengembangkan solusi inovatif dalam menerapkan kebijakan (Haris et al., 2023).

2) *Institutional Design* dan *Facilitative Leadership*

Salah satu temuan penting dari studi ini adalah mekanisme koordinasi MECoK yang sifatnya informal dan adaptif. Temuan penelitian menyatakan, di MECoK sebenarnya belum sepenuhnya terinstitusionalisasi melalui sistem formal atau nota kesepahaman *Memorandum of Understanding* (MoU) yang secara eksplisit mengatur tata pengelolaan jangka panjang, sementara yang sudah ada adalah MoU pembanguan kawasan. Selain itu, mekanisme koordinasi antaraktor lebih

bersifat *event-based* menyesuaikan keperluan program, bukan melalui forum deliberatif yang dijadwalkan secara periodik. Temuan Rahadi & Octavera (2020) menyoroti peran rapat periodik terhadap *Good Corporate Governance*, dijelaskan bahwa frekuensi rapat tidak selalu berdampak terhadap kinerja organisasi, justru partisipasi aktif dalam rapat gabungan yang dapat meningkatkan profitabilitas. Direktur Program IKAMaT mengungkapkan:

> "*MECoK dikembangkan dengan konsep kolaboratif, dan memang belum ada periode rapat bulanan yang terjadwal secara tetap. Koordinasi biasanya lebih bersifat event-based atau program-based, disesuaikan dengan kebutuhan dan skala kegiatan yang akan dilaksanakan*." (Wawancara, 27 November 2025).

Pola tersebut mengindikasikan bahwa sinergi digerakkan dalam struktur yang adaptif dan pragmatis dengan fleksibilitas sebagai instrumen dasar dalam mengawal kelangsungan kolaborasi. Sebagaimana kerangka *collaborative governance* Ansell dan Gash (2008), *institutional design* menekankan perlunya forum deliberatif dengan aturan formal yang jelas, dan prosedur yang dapat menjamin keterlibatan secara inklusif sebagai landasan utama stabilitas kolaboratif itu sendiri. Aturan institusionalisasi dipandang sebagai cara untuk mengurangi ambiguitas peran dan menjaga kontinuitas kolaborasi (Sulistyo & Rahayu, 2024). Sementara temuan di MECoK menunjukkan konfigurasi yang tidak sepenuhnya selaras dengan asumsi tersebut. Meskipun dalam pengelolaan fleksibilitas informal memungkinkan respons cepat terhadap kebutuhan program, ketiadaan kerangka manajemen formal untuk jangka panjang menempatkan keberlanjutan kolaborasi pada stabilitas hubungan interpersonal dan komitmen antar aktor. Dengan demikian, desain kelembagaan yang dihasilkan mencerminkan adaptasi kontekstual daripada penerapan ideal dari model deliberatif.

Sementara itu, pada *facilitative leadership* temuan mendapati pola kepemimpinan pengelolaan MECoK terbagi jelas perannya sesuai dengan wewenang masing-masing aktor. Posisi KeSEMaT dan IKAMaT sebagai pelaksana konservasi teknis dan operasional, sementara itu UNDIP sebagai institusi pemilik lahan sekaligus fasilitator, kemudian pemerintah Kabupaten Jepara sebagai penyedia legalitas dan payung hukum formal. Ini selaras dengan konsep *facilitative leadership* Ansell dan Gash (2008) di mana kolaborasi dibangun dan dijalankan secara bersama-sama, bukan berjalan terpusat pada satu individu. Meski demikian, struktur tersebut bukan seutuhnya menjamin keseimbangan otoritas pengambilan keputusan, ini karena posisi struktural UNDIP dalam berbagai isu fundamental masih menempatkannya sebagai aktor dengan pengaruh besar, sehingga ruang kolaborasi bergerak menuju sruktur semi-hierarkis.

3) *Collaborative Process*

Praktik kolaboratif di MECoK Ecopark berlangsung melalui interaksi intensif dari aktivitas yang berjalan rutin, misal melalui penelitian, edukasi lapangan, maupun dari kegiatan aksi penanaman. Ansell dan Gash (2008) merinci lima aspek dalam *collaborative process*, meliputi: *Face to face dialogue*, di MECoK sendiri proses ini dijalin berkala melalui aktivitas lapangan, baik dengan komunitas, akademisi, pelajar maupun masyarakat, juga melalui program

Mangrove Cultivation dan *Mangrove Replant* untuk memperkuat literasi terkait mangrove. Kemudian *Trust building* yang diperkuat melalui komunikasi atau sistem monitoring kegiatan. Lalu *Commitment to the process* didukung dari konsistensi lembaga dalam pengelolaan kawasan MECoK selama lebih dari dua dekade, dan *Shared understanding* terkait visi dan prioritas konservasi untuk menyatukan arah gerak kolaborasi dan diperkuat dengan platform *MangroveTag (mangrovetag.com),* sebagai layanan instrumen digital yang dikembangkan untuk pendampingan berbagai pihak dalam restorasi ekosistem pesisir dan mitigasi perubahan iklim secara terukur dan transparan. serta *Intermediate outcomes* atau hasil antara yang menunjukkan capaian konservasi sebagai *core mission*.

Tabel 1. Analisis Kesesuaian MECoK dengan Model *Collaborative Governance* Ansell & Gash

Komponen	Indikator	Temuan	Penilaian
Starting Conditions	Ketidakseimbangan kekuasaan, insentif partisipasi, sejarah konflik.	Asimetri sumber daya, inisiatif mahasiswa, dukungan instansi UNDIP, dukungan pemerintah bertahap menyusul.	Sesuai
Institutional Design	MoU formal, rapat rutin, aturan jelas.	Koordinasi *event-based,* ada MoU pembangunan & operasional, namun belum ada MoU pengelolaan jangka panjang.	Kurang sesuai
Facilitative Leadership	Kepemimpinan tidak dominan, keputusan konsensus.	Kepemimpinan tersebar. UNDIP (akademik), KeSEMaT (teknis), IKAMaT (jaringan), Pemerintah (regulasi).	Sangat Sesuai
Collaborative Process	Dialog, kepercayaan, komitmen, visi bersama.	Dialog dan pengelolaan konsisten, visi sama (konservasi, edukasi, SDGs).	Sesuai
Intermediate Outcomes	Pencapaian bertahap terukur.	Ekosistem pulih, edukasi berjalan, berkontribusi ke SDGs.	Sangat Sesuai

Sumber : diolah oleh penulis, 2025

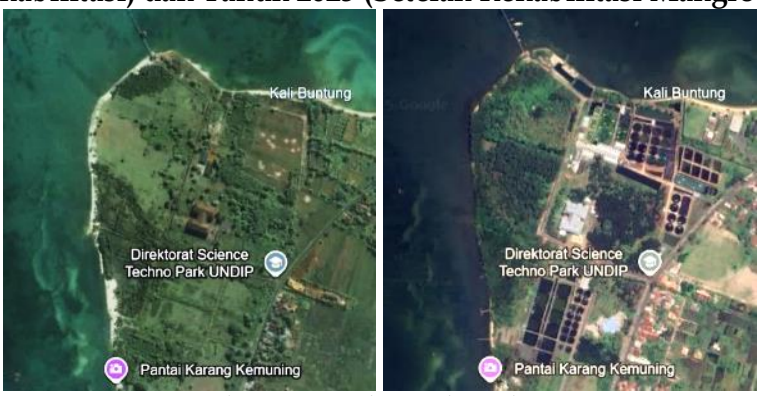
Berdasarkan hasil pemetaan tabel di atas, sinergi kolaborasi di MECoK sejalan dengan empat dari lima komponen utama model *collaborative governance* Ansell dan Gash. *Starting conditions* yang ditandai asimetri kekuasaan justru membentuk peran yang komplementer, di mana mahasiswa membawa fleksibilitas sementara institusi UNDIP dan pemerintah sama-sama memberikan dukungan dan legitimasi. Hasil *facilitative leadership* juga terdistribusi efektif sesuai kapabilitas masing-masing aktor, dan *collaborative process* yang berjalan baik melalui konsistensi dialog dengan kepercayaan dan visi yang telah lama dibangun. Hanya saja gap teridentifikasi pada *institutional design* yang masih informal. Meskipun telah ada MoU pembangunan dan operasional, belum adanya MoU pengelolaan kawasan jangka panjang dapat berdampak pada risiko keberlanjutan pemeliharaan bahkan ketergantungan terhadap *goodwill* personal.

Meskipun *institutional design* belum terformalisasi secara penuh, kesesuaian *intermediate outcomes* tetap memperlihatkan hasil yang tinggi. Dikutip dari Emerson (2012) siklus *collaborative dynamic,* menunjukkan bahwa motivasi dan proses komitmen bersama tetap dapat mempertahankan kolaborasi, bahkan ketika *institutional design* masih belum optimal. Klaim tersebut bahkan didukung empiris pada riset (Alfiandri et al., 2024), bahwa pengembangan mangrove di Bintan Island menunjukkan *stakeholder hybrid* antara masyarakat dan pemerintah berhasil via regulasi adaptif meskipun tanpa forum komunikasi yang ideal. Ini menekankan bahwa capaian bukan hanya ditentukan oleh kelengkapan sistem yang formal, melainkan dari konsistensi komitmen, kooordinasi yang berkelanjutan, dan terjaganya visi bersama.

Capaian Pengelolaan MECoK terhadap SDGs

Sinergi multiaktor dalam konservasi MECoK Ecopark cukup banyak menghasilkan dampak komprehensif terhadap pembangunan berkelanjutan (SDGs). Dalam aspek ekologi, transformasi lahan yang dulunya gersang dan tererosi sekarang menjadi area yang kaya akan ekosistem. Dari 25 ha lahan yang dikelola UNDIP, sekitar 5 ha diantaranya telah tertanam lebih dari 1,2 juta bibit mangrove mencapai 90% dari luas zona tersebut dengan total ± 34 spesies.

Gambar 3. Perubahan Tutupan Lahan MECoK Ecopark: Tahun 2001 (Sebelum Rehabilitasi) dan Tahun 2025 (Setelah Rehabilitasi Mangrove)



Sumber : Citra satelit Google Earth, 2025

Gambar di atas menunjukkan transformasi kondisi kawasan MECoK sebelum dan sesudah rehabilitasi. Pada tahun 2001 (gambar kiri), pesisir Teluk Awur tampak terdegradasi. Sedangkan pada tahun 2025 (gambar kanan), kawasan tersebut telah didominasi vegetasi mangrove. Transformasi tersebut mengindikasikan bahwa rehabilitasi mangrove mampu dicapai melalui sinergi kolaborasi berkelanjutan, ini sejalan dengan SDG 17 *(Partnerships for the Goals)*. Pulihnya kawasan dengan meningkatnya tutupan mangrove telah berkontribusi secara langsung terhadap SDG 14 *(Life Below Water)* dan SDG 15 *(Life on Land),* sekaligus mendukung SDG 13 *(Climate Action)* mengingat daya mangrove menyimpan karbon signifikan lebih tinggi dibandingkan hutan terestrial. Berdasarkan wawancara, informan menyebutkan vegetasi mangrove di MECoK sendiri mampu menyimpan potensi serapan karbon hingga 2.500 MgC/5 ha.

Selain aspek ekologi, MECok juga berkembang sebagai ruang edukasi yang transformatif. Pada Tahun 2022 Taman Mini SDGs dibentuk untuk

mengintegrasikan konsep ekoeduwisata mangrove. Berbagai fasilitas seperti museum mangrove, *smart garden, rain garden,* pembelajaran transformatif, toilet pintar, dan *solar tree* memungkinkan para pelajar, mahasiswa, maupun peneliti dapat terlibat untuk mempelajari sekaligus meningkatkan kesadaran lingkungan. Berdasarkan pendekatan *Experiential Learning Theory*, dikutip dari (Akbar, 2025) pembelajaran dapat lebih optimal ketika individu terlibat langsung dalam pengalaman yang mereka alami. Adanya partisipasi berbagai pihak, perguruan tinggi, dukungan pemerintah turut mengembangkan dampak sosial-ekonomi, sehingga dapat berkontribusi dalam SDG 4 *(Quality Education)*, SDG 8 *(Decent Work and Economic Growth),* dan SDG 11 *(Sustainable Cities and Communities).*

Seiring berkembangnya kontribusi terhadap SDGs, temuan juga mengindikasi dinamika yang perlu direspons secara adaptif di MECoK. Berdasarkan observasi, berbagai sarana pendukung area ekoeduwisata mengalami penurunan kondisi dibanding periode sebelumnya, sehingga menyebabkan akses dan pemanfaatannya saat ini belum lagi optimal. Adaptabilitas ini mulanya timbul dari respons setelah insiden penyalahgunaan akses. Masuknya kendaraan bermotor ke area tracking mangrove mengakibatkan kerusakan jembatan, persoalan tersebut kemudian ditanggapi dengan penerapan sistem perizinan melalui MSTP *(Marine Science Techno Park)* apabila ingin mengakses kawasan. Sehingga integritas ekosistem akan tetap terjaga tanpa harus menutup akses edukatif sepenuhnya. Situasi ini menunjukkan pentingnya penguatan mekanisme pemeliharaan dan keberlanjutan dalam kerangka kolaboratif. Meski demikian, di sisi kawasan konservasi tetap terpelihara baik yang memperlihatkan konsistensi terhadap segi ekologis. Dengan kata lain, kontribusi MECoK terhadap SDGs 13, 14, dan 15 relatif terlihat dalam aspek ekologi, sementara penguatan SDGs 4, 8, 11, dan 17 masih membutuhkan penguatan alokasi peran dan pendanaan berkelanjutan guna memastikan dampak yang lebih terintegrasi.

Temuan menafsirkan sentralitas kewenangan oleh institusi dalam hal akses maupun pengambilan keputusan tidak selalu mencerminkan *institutional centrality bias,* namun itu merupakan konsekuensi struktural dari mandat akuntabilitasnya sebagai pemilik lahan. Akan tetapi, legitimasi struktural ini perlu diimbangi dengan penguatan forum musyawarah yang lebih sistematis antar pemangku kepentingan, sehingga kebutuhan pemeliharaan fasilitas tidak terhambat oleh situasi rantai birokrasi yang panjang. Ketika fasilitas membutuhkan intervensi bersama, sementara pengelolaan ekologis relatif stabil, distribusi tanggung jawab yang tidak merata justru dapat menghambat efektivitas kolaborasi. Dalam kerangka Ansell dan Gash (2008), situasi tersebut berpotensi mengikis efektivitas kolaborasi dari timbulnya fragmentasi kelembagaan. Maka langkah strategis untuk keberlanjutan kawasan agar lebih konsisten yakni dengan menegaskan peran dan mendistribusikan kembali fungsi antaraktor.

KESIMPULAN

Tulisan ini mengungkap bahwa pengelolaan MECoK Ecopark merepresentasikan praktik *collaborative governance* berdasarkan inisiatif *bottom-up* dalam konfigurasi semi-hierarkis dengan multiaktor di bawah naungan institusi akademik yang telah dilegalisasi pemerintah. Efektivitas kolaborasi juga berkontribusi secara signifikan mencapai target-target SDGs, sehingga menguatkan berbagai pilar pembangunan berkelanjutan. Dalam kerangka Ansell

dan Gash, sinergi didukung oleh *starting conditions*, *facilitative leadership*, dan *collaborative process* yang relatif stabil, namun masih terdapat gap pada *institutional design*. Dalam hal ini terungkap bahwa kekuatan kolaborasi lebih bertumpu pada kredibilitas aktor dibandingkan formalisasi kelembagaan.

Temuan ini menegaskan *collaborative governance* tetap relevan dalam konteks *non-government*, tetapi perlu penyelarasan ketika aktor utama berasal dari institusi akademik. Dominasi tersebut tidak melemahkan prinsip kolaboratif, namun berpotensi adanya ketergantungan apabila tidak diimbangi pendistribusian peran dan mekanisme akuntabilitas. Penelitian ini bukan hanya mengonfirmasi acuan Ansell dan Gash, tapi juga mereposisi persepsi *collaborative governance*, bahwa kohesi relasional tetap menjadi asas kolaborasi yang efektif. Namun tanpa institusionalisasi yang memadai, cenderung mewujudkan tata kelola yang adaptif tetapi bersifat kontingen dan belum sepenuhnya berkelanjutan. Berdasarkan temuan, penelitian ini merekomendasikan: 1) Perlunya rancangan partisipasi yang lebih sistematis guna memastikan keberlanjutan supaya tidak semata bersandar pada dorongan institusional. Hal ini disebabkan, minimnya partisipasi (warga lokal) dapat berpotensi melemahkan *social legitimacy* kawasan konservasi; 2) Pengelola perlu menetapkan evaluasi berkala yang tidak hanya berorientasi pada *output* program, namun juga pada kualitas proses kolaborasi sebagai indikator tata kelola yang berkelanjutan.

Adapun keterbatasan riset ini adalah perspektif dominan dari pengelola utama, sehingga analisis yang dihasilkan masih bersifat parsial. Hal tersebut membuka peluang bagi kajian lanjutan supaya dapat mencakup perspektif aktor yang lebih beragam, seperti pemerintah dan masyarakat selaku penerima manfaat, guna menganalisis distribusi peran antaraktor, khususnya fungsi legitimasi pemerintah dan konstruksi makna masyarakat atas dampak konservasi. Selain itu, penelitian longitudinal juga diperlukan untuk mengevaluasi keberlanjutan relasi sinergi antaraktor, khususnya dalam konteks pergantian generasi di MECoK Ecopark, mengingat tata kelola tidak dapat dinilai dari satu titik waktu saja.

IMPLIKASI PRAKTIS & TEORITIS

Pengelolaan di MECoK Ecopark perlu menguatkan desain kelembagaan dengan perjanjian kerja sama yang terstruktur, distribusi tanggung jawab yang jelas, dan sistem evaluasi berdasarkan target SDGs untuk memastikan kolaborasi berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada aktor tertentu. Model MECoK dapat direplikasi dalam konteks lain yang menemui persoalan dalam pengelolaan sumber daya, terutama apabila institusionalisasi kerjasama belum ideal, dengan mengadopsi bentuk kepemimpinan berbasis kredibilitas institusional dan distribusi peran antaraktor secara kontekstual, prasyaratnya meliputi: kapasitas kelembagaan, dukungan kebijakan, dan kejelasan peran, sehingga efektivitas replikasi bertumpu pada kesesuaian kondisi lokal.

Secara teoretis, studi ini menggeser asumsi kerangka Ansell dan Gash tentang pola *collaborative governance* yang kerap memposisikan formalisasi kelembagaan sebagai batas utama efektivitas kolaborasi. Temuan ini menunjukkan dalam konteks konservasi lokal, kolaborasi masih dapat berjalan melalui konfigurasi kepemimpinan dan distribusi wewenang antaraktor meskipun formalisasi belum optimal. Maka ditegaskan bahwa dimensi aktor

relasional berfungsi sebagai landasan awal, sementara formalisasi kelembagaan menjadi faktor penunjang keberlanjutan kolaborasi.

REFERENCES

Akbar, I. (2025). Relevansi dan Implementasi Teori Experiential Learning Kolb dalam Konteks Pendidikan Kontemporer. *Al-Khazin: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, *1*(2), 73–82.

Alfiandri, Prasojo, E., Jalaluddin, & Malik, A. (2024). Fostering Sustainable Mangrove Eco-tourism : A Collaborative Governance Approach in Bintan Island , Indonesia. *Jurnal Studi Pemerintahan*, *15*(3), 340–362. https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jsp.v15i3.334

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART*, *18*(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Azzahra, A. I., Jumari, & Utami, S. (2025). Mangrove Vegetation Structure in the Marine Science Techno Park (MSTP) Area, Teluk Awur, Jepara Regency, Central Java. *BIOMA: Berkala Ilmiah Biologi*, *27*(1), 20–31.

Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Third Edit). Sage Publications Ltd.

Darniyus, A. (2025). Mengkaji Kolaborasi Kebijakan Publik dalam Percepatan SDGs Lingkungan Lokal : Tinjauan Pustaka Inisiatif di Berbagai Daerah. *IKRAITH-EKONOMIKA*, *8*(1), 722–729.

Deciawarman, E., Wibowo, P. P. L., Irawan, D., Irviansyah, A., Darmin, & Rahmawati. (2025). Menakar Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Mangrove : Analisis Faktor Pendukung dan Tantangannya di Kalimantan Timur. *Jurnal Hutan Tropis*, *9*(2), 487–502. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32522/ujht.v9i2.23423 Menakar

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART*, *22*(1), 1–29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011

Enala, S. H., Mana, F. A., & Adam, A. F. (2025). *Penguatan Tata Kelola Potensi Lokal Berbasis Masyarakat Pesisir untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Merauke*. *8*(1), 30–35.

Fuady, M., Kevin, M. A., & Farrel, M. R. (2025). Mangrove Forest Conservation for Disaster Mitigation and Community Welfare in Banda Aceh : a Suistainable Development Goals (SDG ' S) Approach. *Journal of Lifestyle & SDG's Review*, *5*, 1–22. https://doi.org/https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n03.pe04787

Haris, A., Tahir, S., Nurjaya, M., & Baharuddin, T. (2023). Analisis Bibliometrik Tentang Mitigasi Bencana dan Pembangunan Berkelanjutan : Inisisasi Kebijakan Untuk Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, *8*(4), 314–324.

Hidayatullah, M. A., Purnaweni, H., & Yuwono, T. (2023). Proses Collaborative Governance dalam Penanganan Banjir di Kota Semarang. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, *8*(4), 276–285.

Ibramsyah, A. R., & Samadi, S. (2024). Potensi Ekowisata dan Nilai Konservasi Kawasan Mangrove Teluk Awur, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. *Jurnal Geografi*.

Jamily, I. Al. (2024). *Network Governance dalam Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Luwu Timur*. Universitas Hasanuddin Makassar.

Kurniati, R., Handayani, W., Prabawani, B., Nida, R. S., & Savitri, S. F. (2024). Community Participation Community Readiness, and Preferences to Promote Edu-Tourism in Mangrove Areas of Teluk Awur Village, Jepara, Indonesia. *Planning Malaysia Journal*, *22*(4), 370–384.

Pamungkas, Y. P., Rahadiya, A. F., Satrioajie, W. N., Pribadi, R., & Indarjo, A. (2024). Interaksi Sistem Sosial Ekologi Ekosistem Mangrove di Wilayah Pesisir Desa Teluk Awur, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, *10*(1), 83–91.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2025 Tentang Perlindungan & Pengelolaan Ekosistem Mangrove (2025). https://peraturan.bpk.go.id/Details/320198/pp-no-27-tahun-2025%0A

Permatasari, A. (2023). Collaborative Governance BUMD Desa Margaasih Kabupaten Bandung. *Reformasi*, *13*(1), 25–33.

Pinandhika, M. F., & Harsono, D. (2023). Collaborative Governance dalam Pengembangan Konservasi Mangrove Wana Tirta di Desa Jangkaran Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo. *Journal of Public Policy and Administration Research*, *01*(01).

Pradana, A. W., Rahayu, A. Y. S., Dinaseviani, A., Asmara, A. Y., Lastiwi, D. T., Indriasari, D. T., Kusumawardhani, D., Anggraeni, D., Jatraningrum, D. A., Aziz, N., Putra, F., Ferianto, Filia Icha Sukamto, G., Yogaswara, B., Ulum, M. C., Rozikin, M., Rahma, N. M., Putri, P. Y., Hananto, P. M., & Hastuti, T. (2025). *Kolaborasi dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep dan Praktik*. Universitas Brawijaya Press.

Presta, O. D., Alfitri, Thamrin, M. H., Putra, R., & Adam, R. (2025). Evaluasi Tata Kelola Mangrove di Air Telang , Banyuasin : Antara Kebijakan Formal dan Praktik Lokal. *Jurnal Locus: Penelitian & Pengabdian*, *4*(9), 9130–9144.

Rahadi, F., & Octavera, S. (2020). Pengaruh Frekuensi Rapat dan Partisipasi Dewan Direksi Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, *22*(1), 63–72.

Rohmawati, Q., Wulandari, N. E., Soleh, A., Widarti, R., Musyafiatun, Putri, G. V., & Fauzan. (2022). Program Konservasi Mangrove di Pantai Glagah Wangi Demak Ditinjau dari Upaya Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Kualita Pendidikan*, *3*(3), 168–175.

Serhalawan, H., Siahainenia, L., & Abrahamsz, J. (2025). Strategi Pengelolaan Komunitas Mangrove Di Kawasan Wisata Kairatu Beach Berbasis Kondisi Bioekologis Dan Bentuk Pemanfaatan. *Jurnal Perikanan Kamasan*, *6*(1), 47–61. https://doi.org//doi.org/10.58950/jpk.v6i1.84 Available

Siringoringo, G. L. R. (2022). Program dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam Hal Masalah Perubahan Iklim di Indonesia. *Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi*, *5*(1), 43–52.

Sulistyo, A., & Rahayu, A. Y. S. (2024). Collaborative Governance dalam Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 236–252.

Widodo, E. R. S., Akili, A. S., Ariesna, Y. D., Utina, R., & Baderan, D. W. K. (2025). Tinjauan Literatur tentang Peran Ekosistem Mangrove dalam Mendukung Kehidupan Alami Populasi Kepiting di Provinsi Gorontalo : Antara Konservasi dan Pemanfaatan Berkelanjutan. *Konstruksi: Publikasi Ilmu Teknik, Perencanaan Tata Ruang Dan Teknik Sipil*, *3*(3), 80–85. https://doi.org/https://doi.org/10.61132/konstruksi.v3i3.865

Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (Sixth Edit). SAGE Publications Ltd.